



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
**UNIT KERJA** : DINAS PERHUBUNGAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AGUS KHOLIK
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 645724

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 775.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/96 m2 di BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 170 m2 di BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
3. Tanah Seluas 170 m2 di BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
4. Tanah Seluas 161 m2 di BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
5. Tanah Seluas 1820 m2 di BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 162.800.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, HONDA VERZA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 11.800.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. MOTOR, HONDA ASTREA PRIMA Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
6. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 42.500.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 28.435.582

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 1.008.735.582

**III. HUTANG**

Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 1.008.735.582

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.